

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN Tahun 2024



PT. BPR BKK MUNTILAN (Perseroda) Kabupaten Magelang

www.bprbkkmuntilan.co.id



Jl. Raya Magelang Yogyakarta Km 10 Mungkid Kabupaten Magelang



Daftar Isi

Daftar Isi	2
BAB I PENDAHULUAN	3
BAB II RINGKASAN EKSEKUTIF	5
BAB III PROSES PENYUSUNAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN	8
BAB IV FAKTOR PENENTU RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN	<u>c</u>
BAB V PRIORITAS DAN URAIAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN	11
BAB VI PENUTUP	13

BAB I PENDAHULUAN

1. Sejarah Singkat

PT. BPR BANK MUNTILAN (Perseroda) berawal dari Badan Kredit Kecamatan yang didirikan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 4 September 1969 Nomor Dsa. <u>G.226/1969</u>. 12/19/24 jo tanggal 19 November 1970 Nomor Dsa. <u>G.323/1970</u>. 8/2/4 dengan status waktu itu BKK sebagai proyek Modal awal bersumber dari APBD Jateng berupa pinjaman sebesar Rp 1 juta, Sejalan dengan perkembangan perekonomian di Jawa Tengah, ternyata perkembangan operasional BKK makin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat/pengusaha di pedesaan. Pemerintah propinsi Jawa Tengah ini memantapkan kedudukan BKK tersebut. Peningkatan status Badan Kredit Kecamatan menjadi Bank Perkreditan Rakyat pada Tahun 1991.

Pada Tanggal 4 November 2006 PD. BPR BKK di Kabupaten Magelang melakukan penggabungan usaha (merger) dari 11 PD. BPR BKK se Kabupaten Magelang menjadi PD. BPR BKK MUNTILAN.

Kantor Pusat hasil merger berada di jalan Yasmudi No.2 Muntilan, pada tahun 2017 Kantor Pusat pindah di Jl Raya Magelang - Yogyakarta Km 10 Mungkid karena kantor lama sudah tidak memadai dengan jumlah pegawai dan untuk meningkatkan performance PT BPR BKK Muntilan (Perseroda) dimasyarakat.

Legalitas Perusahaan

- 1. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 580/75/2006 tanggal 3 November 2006 tentang Persetujuan Penggabungan Usaha (Merger) PD. BPR BKK Borobudur, Sawangan, Salams, Ngluwar, Kaliangkrik, Windusari, Tegalrejo, Candimulyo dan Mungkid, menjadi PD. BPR BKK MUNTILAN.
- 2. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 5, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah : (5-124/2018) dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 99 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan MUNTILAN Kabupaten MUNTILAN (PD BPR BANKMUNTILAN) berubah menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan MUNTILAN (Perseroda) (PT BPR BANKMUNTILAN PERSERODA) Kabupaten MUNTILAN;
- 3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004541.AH.01.01.Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT BPR BKK MUNTILAN PERSERODA tanggal 24 Januari 2020 (Dicetak pada tanggal 24 Januari 2020 Daftar Perseroan Nomor AHU-0015054.AH.01.11.Tahun 2020 Tanggal 24 Januari 2020);

- 4. Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor KEP-50/KR-03/2020 tentang Persetujuan Atas Pengalihan Usaha BPR Dari Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan MUNTILAN Kepada Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan MUNTILAN (Perseroda);
- 5. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-39/KR.0313/2020 tanggal 31 Maret 2020 Perihal : Persetujuan Pengalihan Izin Usaha dari Badan Hukum Lama kepada Badan Hukum Baru.

BAB II RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, PT BPR BKK Muntilan (Perseroda) membuat Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan menggambarkan rencana kegiatan usaha dan program kerja Bank dalam jangka pendek (satu tahun) dan jangka panjang (lima tahun) termasuk strategi untuk merealisasikan rencana dan program kerja tersebut, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko,

Melalui Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ini, Bank memiliki pedoman dalam penyelenggaran pembangunan ekonomi berkelanjutan yang selaras dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Latar Belakang

Sebagai lembaga jasa keuangan, PT BPR BANKMUNTILAN (Perseroda) turut serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas eekonomi yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.

1. Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Tahun 2024 merupakan awal implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang pencapaiannya merupakan tanggung jawab Direksi dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Sehingga program-program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan baik jangka pendek maupun jangka panjang dapat tercapai secara efektif, terukur dan terarah, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.

2. Visi dan Misi

Visi:

" Mewujudkan Bank yang sehat, kuat dan efisien"

Misi:

- a. Mendorong karyawan untuk meningkatkan kinerja.
- b. Menciptakan daya saing semakin kuat.
- c. Motor penggerak ekonomi masyarakat.
- d. Menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.

11

3. Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan bertujuan untuk mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan produk dan jasa Bank dengan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

4. Program yang akan dilaksanakan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan baru akan diimplementasikan oleh PT BPR BANKMUNTILAN (Perseroda) pada tahun 2024 ini, dengan program yang akan dilaksanakan meliputi:

a. Rencana jangka pendek (satu tahun):

Menyiapkan kebijakan dan prosedur operasional, tata kelola serta sumber daya organisasi untuk mendukung penerapan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

- b. Rencana jangka panjang (lima tahun):
 - 1. Penguatan struktur permodalan dan pemenuhan struktur organisasi Bank.
 - 2. Pemberdayaan pedagang pasar dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, wisata lokal yang berkesinambungan.
 - 3. Edukasi literasi pembangunan ekonomi dan kegiatan usaha berkelanjutan.
 - 4. Pengembangan produk atau jasa keuangan berkelanjutan baik penghimpunan dana maupun pemberian kredit
 - 5. Bekerjasama dengan dinas dan/atau instansi terkait untuk mengalokasikan penggunaan sebagian dana CSR untuk mendukung pelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam.
 - 6. Pekerjaan landscaping kantor dengan konsep hemat energi.
 - 7. Pengembangan produk dan jasa berbasis teknologi (digitalisasi perbankan).
 - 8. Penghematan energi tidak terbarukan dalam operasional sarana dan prasarana Bank.
 - 9. Mengurangi penggunaan barang atau produk tidak ramah lingkungan dalam kegiatan Bank.

5. Alokasi Sumber Daya

Kegiatan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan diatas membutuhkan dana yang bersumber dari internal perusahaan, yaitu dana operasional, biaya pemasaran, dana CSR dan/atau dana kemitraan. Sedangkan pelaksanaan kegiatan melibatkan seluruh elemen perusahaan, pihak eksternal selaku mitra bank, dan masukan dari regulator maupun otoritas dalam pelaksanaannya.

6. Penanggungjawab Pelaksanaan

Unit kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penerapan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan pada PT BPR BKK Muntilan (Perseroda) adalah:



1) Direksi

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan secara keseluruhan

2) Divisi Umum, Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan APU PPT

Bertanggung jawab dalam penyesuaian ketentuan internal dan eksternal terkait penerapan keuangan berkelanjutan, menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan dalam rangka pelaksanaan program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, mengelola penggunaaan dana *Corporate Social Responsibility* atau dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), melakukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan melakukan efisiensi kegiatan operasional dalam rangka program aksi keuangan berkelanjutan.

3) Divisi Kredit

Bertanggungjawab dalam penyaluran kredit pada kategori kegiatan usaha berkelanjutan dan memproyeksikan pertumbuhan penyaluran kredit kategori kegiatan usaha berkelanjutan dan mengelola pelaksanaan program aksi keuangan berkelanjutan yang menjadi bidang tugasnya.

4) DIvisi Dana

Bertanggung jawab menerbitkan atau mengembangkan produk./jasa keuangan berkelanjutan dan mengelola pelaksanaan program aksi keuangan berkelanjutan yang menjadi bidang tugasnya

BAB III PROSES PENYUSUNAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

1. Rujukan Yang Digunakan Sebagai Acuan

Rujukan yang digunakan sebagai acuan PT BPR BKK Muntilan (Perseroda) dalam menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, yaitu:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
- b. Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I 2024
- c. Keputusan Direksi terkait dengan Pedoman Penggunaan Dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

2. Pihak Yang Terlibat Dalam Penyusunan

Dalam proses penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, PT BPR BKK Muntilan (Perseroda) tidak menggunakan pihak ketiga atau konsultan. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan RKAB adalah Direksi, Bagian Umum, Manajemen Risiko, Kepatuhan dan APU PPT, Kepala Bagian Dana, Kepala Bagian Kredit dan Kantor Pusat Operasional. Adapun proses penyusunan RAKB sebagai berikut:

- 1. Sosialisasi POJK
- 2. Pengumpulan informasi dan literasi terkait Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
- 3. Perumusan prioritas aksi keuangan berkelanjutan
- 4. Pengumpulan data dari unit kerja terkait
- 5. Penyusunan RKAB
- 6. Persetujuan Direksi
- 7. Persetujuan Dewan Komisaris.

BAB IV FAKTOR PENENTU RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

Faktor penentu yang menjadi dasar penetapan tujuan dan prioritas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan antara lain:

1. Rencana Strategis Bank

Dalam pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, Bank berusaha menyelaraskan Rencana Strategis Bank agar dapat diformulasikan sesuai dengan Roadmap Keuangan berkelanjutan yang dicanangkan oleh pemerintah. PT BPR BKK Muntilan (Perseroda) dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Magelang selaku pemilik bersinergi mendorong peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah yang berkelanjutan melalui program-program pengembangan UMKM dan kegiatan operasional Bank, yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

2. Kapasitas Organisasi

Dalam upaya mencapai visi dan misi PT BPR BKK Muntilan (Perseroda) didukung oleh sumber daya manusia yang cukup memadai. Tahun 2023 ini, PT BPR BKK Muntilan (Perseroda) dengan modal inti kurang dari 50 milyar dan mulai mengimplementasikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, sehingga BPR berupaya memenuhi struktur organisasi dan melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusianya, sesuai dengan arah dan pengembangan bisnis yang selaras dengan program keuangan berkelanjutan.

3. Kondisi Keuangan dan Kapasitas Teknis

Pandemic Covid19 masih menyisakan dampak bagi perekonomian nasional, sehingga tahun 2024 target pertumuhan Bank tidak terlalu tinggi. Namun demikian kondisi keuangan BPR dalam kondisi baik, seluruh rasio keuangan dalam kondisi sehat sehingga mampu mendukung pelaksanaan RKAB.

4. Kerjasama dengan Pihak Eksternal

Untuk tahun 2024, Bank akan melakukan kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam program pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, antara lain program edukasi ke masyarakat kali bersih dengan pemasangan himbauan agar masyarakat tidak membuang sampah dialiran sungai, pelaksanaan pemasangan plang himbauan bekerja sama dengan dinas atau instansi terkait.

Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi Bank dalam pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dilakukan melalui media atau sarana informasi yang ada, baik itu melalui Radio, Spanduk, Banner, surat kabar maupun media sosial yang dikelola BPR melalui share status WA, instagram maupun website resmi BPR.

11

6. Sistem Monitoring, Evaluasi dan Mitigasi

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun 2024 merupakan RAKB yang baru disusun pertamakalinya oleh Bank. Monitoring untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi akan dilakukan secara berkala setiap tahun atau disesuaikan dengan kebutuhan dan capaian kegiatan. Mitigasi risiko dilakukan terhadap setiap aktivitas dan pengembangan produk yang berpotensi risiko tinggi.

7. Kebijakan Pemerintah

Sebagai bank milik Pemerintah, PT BPR BKK Muntilan (Perseroda) mempunyai misi sosial ekonomi terhadap masyarakat, untuk itu dalam kegiatan bisnisnya, Bank berupaya untuk bisa bersinergi dengan pemerintah dalam menggerakkan ekonomi masyarakat dan membantu UMKM sektor ekonomi berkelanjutan untuk dapat tumbuh dan berkembang, sehingga dapat bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

BAB V PRIORITAS DAN URAIAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

1. Program Pertama : Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

a. Dasar Pemikiran

PT BPR BKK Muntilan (Perseroda) memilih pemberdayaan usaha UMKM sebagai program prioritas karena:

- 1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan sektor usaha mayoritas yang menjadi penopang perekonomian di Kabupaten Magelang.
- 2. Selama pandemic Covid, banyak sekali usaha UMKM yang terpuruk, sehingga sebagai Bank yang memiliki misi membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah, serta memberikan pelayanan kredit dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka program pemberdayaan ini menjadi penting untuk diprioritaskan.

b. Kegiatan

Program pertama: edukasi dan literasi

No.	Uraian Kegiatan	Periode Awal	Periode Akhir	Sumber Daya yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab Kegiatan
1.	Edukasi dan Literasi Pemasaran untuk pedagang dan pelaku usaha UMKM (pengrajin batu, pengrajin sapu)	Semester I Tahun 2024	Semester II Tahun 2024	Dana : +- Rp 10 Juta untuk 50 undangan	Bagian Umum, dan Bagian Dana dan Kredit

c. Sumber Daya

1. Sumber dana yang diperlukan untuk kegiatan ini +- Rp. 10 juta, digunakan untuk media kegiatan akomodasi, konsumsi, kegiatan dan souvenir peserta edukasi literasi

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini +- 5 orang dengan melibatkan +- 50 undangan terdiri dari pelaku usaha UMKM, Nara sumber dan tokoh masyarakat lainnya.

3. Mitra Kerjasama

Kegiatan ini dapat dilakukan Bank secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pihak Dinas Koperasi dan Perdagangan sebagai nara sumber.



d. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program

Evaluasi akan dilakukan dengan melihat dari indicator pemahaman peserta dan timeline pelaksanaan kegiatan

e. Tantangan dan Rencana ke Depan

Tantangan yang dihadapi berkaitan dengan perubahan kebijakan pemerintah dan kondisi perekonomian yang belum stabil serta tahun politik di 2024 akan mempengaruhi perekonomian indonesia.

2. Program Kedua:bekerjasama dengan dinas dan/atau instansi terkait untuk mengalokasikan penggunaan sebagian dana CSR untuk mendukung pelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam

No	Uraian Kegiatan	Periode Awal	Periode Akhir	Sumber Daya yang Dibutuhkan	Penanggun g Jawab Kegiatan
1.	Pelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam, 10 plang himbauan dilarang membuang sampah dan limbah di sungai.	Semester I Tahun 2024	Semester II Tahun 2024	- Dana : +- Rp 15 Juta - (15 jt 10 titik)	Devisi Umum
2.	Pengembangan dan penataan wisata Alam.(udal gumuk)	Semester I Tahun 2024	Semester II Tahun 2024	- 5 tempat sampah 5 Juta	Devisi Umum, Dana dan Kredit

3. Program Ketiga: Pengembangan produk dan jasa berbasis teknologi

No	Uraian Kegiatan	Periode Awal	Periode Akhir	Sumber Daya yang Dibutuhkan	Penanggun g Jawab Kegiatan
1.	Pengembangan layanan dengan PPOB,	Semester I Tahun 2024	Semester II Tahun 2024	- Dana:+- Rp 10 Juta - SDM:+-3 Orang	Devisi umum dan Dana
2.	Pengembangan layanan web	Semester I Tahun 2024	Semester II Tahun 2024	- Dana 15 juta	Devisi umum

BAB VI **PENUTUP**

Tahun 2024 merupakan awal implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan program keuangan berkelanjutan lainnya secara bertahap, dengan melihat capaian atas target pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan dan merujuk pada roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II yang telah ditetapkan pemerintah.

Dengan demikian program kerja dan strategi bisnis bank kedepan dapat mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang selaras dengan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan akan dilakukan secara berkala setiap tahun sampai dengan 5 tahun kedepan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ini.

> Mungkid, 12 Desember 2023 PT BPR BKK Muntilan (Perseroda) Kabupaten Magelang

Plt. Direktur Utama

Agustinus Subekti Rahyuwono, SE

Direktur Umum dan Kepatuhan

Direktur Pemasaran